

**PELAKSANAAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DI DESA KENANTAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR  
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 9 TAHUN 2007  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**ROHMAT JUANDA**

**Nim: 108 2700 1990**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## ABSTRAK

Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bentuk pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, baik dari segi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang telah disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membentuk peraturan desa tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya wewenangnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan belum bisa melaksanakan wewenangnya dengan baik, dengan tidak berjalannya pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan peraturan desa

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenantan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa? (2) kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan wewenangnya? Penelitian ini dilakukan di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan dari pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan sudah berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. dan juga untuk mengetahui masalah yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan dalam menjalankan wewenangnya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Hukum sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini bahwa, dalam pelaksanaan wewenangnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan belum berjalan dengan baik,

ini dapat diketahui dari sudah dibentuknya Peraturan Desa namun tidak terlaksana pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

## KATA PENGANTAR

*AssalamualaikumWr, Wb*

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga atas izin dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam di sampaikan kepada junjungan alam Nabi MUHAMMAD SAW yang telah mengantarkan umatnya ke pintu gerbang kecerdasan.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis tidak pula juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta seluruh staf-stafnya.
2. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum.
3. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, serta pembimbing skripsi yang

- sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Magfirah, M.A. sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
  5. Bapak H. Azwar Aziz, SH. Msiselaku Penasehat Akademik yang telah member dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
  6. Bapak Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan dalam menyelesaikan perkuliahan ini,
  7. Bapak Kepala Perpustakaan beserta seluruh stafnya yang memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Bapak Heri Suprihantaselaku Kepala Desa Kenantan yang telah memberikan izin untuk meneliti di Desa tersebut.
  9. Teristimewabuat Ayahanda Amir Tanjung dan Ibunda Megawati yang telah banyak berjasadalam memenuhi kebutuhan baik materi maupun moril kepada penulis selama menempuh pendidikan sertaseluruhuntai ando'anya untuk keberhasilan penulis. kakak uters yang Masnia Sari yang selalumemotifasi penulis untuk terus berusaha agar berhasil.
  10. Buatsahabat-sahabatku Pendi, Saipul, Gito, Rubidan Puja yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Buatadikku Siti Umayatul Amanah yang selalu di hati yang tidak mungkin di lupakan,

terimakasih penulis ucapkan karena selalu memotivasi penulis bahkan meluangkan waktu dan hari-hari nya buat penulis demi terselesainya skripsi ini.

12. Buat seluruh teman-teman jurusan Ilmu Hukum angkatan 2008 khususnya teman-teman lokal IH 1 yang telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

13. Kepada teman-teman KKN di  
Desa Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti Tahun 2011

Semoga ALLAH SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum.

*Wasalamualaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, April 2013

Penulis

**ROHMATJUANDA**

**108 2700 1990**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENESAHAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x

<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II: GAMABARAN UMUM LOKASI PENULISAN.....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Desa Kenantan .....	18
B. Kondisi Geografis .....	20
C. Gambaran Umum demografis.....	21
D. Kependudukan .....	22
E. Pendidikan .....	23



F. Kondisi Ekonomi.....	23
G. Kamtibmas dan Partisipasi Masyarakat .....	24
<b>BAB III: TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>27</b>
A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia.....	27
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Kemerdekaan Dan Era Pemerintahan Orde Lama (1945-1960) .....	33
2. Badan Permusyawaratan Desa Pada Era Pemerintahan Orde Baru.....	35
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Era Reformasi .....	38
B. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa .....	44
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan Berdasarkan PERDA Kab. Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa .....	49
1. Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa .....	52
2. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa.....	55
3. Mengusulkan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa .....	60
a. Pengangkatan Kepala Desa.....	60
b. Pemberhentian Kepala Desa .....	61
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	63
5. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	67
6. Menyusun Tata Tertib BPD	

B. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh BPD	
Dalam Melaksanakan Wewenangnyanya .....	73
1. Kurangnya Pemahaman Anggota BPD Terhadap Pelaksanaan Wewenang BPD.....	74
2. Faktor Usia.....	75
3. Kurangnya Sarana Dan Prasarana .....	76
4. Kurangnya Kesadaran Hukum Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	77
5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Untuk Membantu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	80
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

## Daftar Pustaka

## Lampiran-Lampiran

## DAFTAR TABEL:

Tabel II.1. PerincianJumlahPendudukBerdasarkanKlasifikasiPekerjaan.....	23
Tabel II.2. FasilitasPendidikan .....	24
Tabel II.3 Klasifikasi Tingkat PendidikanPenduduk.....	24
Tabel II.4. Data Anggota BPD DesaKenantanPriode 2008-2014 .....	27
Tabel IV.1 JawabanRespondenTentangPeraturan Yang Digunakan BPD DalamMelaksanakaknWewenangny.....	51
Tabel IV.2 BPD desakenantanmembahasrancanganperaturandesadanperaturankepaladesa .....	54
Tabel IV.3 PelaksanaanPengawasan BPD TerhadapPerdesdanPeraturanKepalaDesa .....	59
Table IV. 4 upaya yang di lakukanapabilakepaladesamelakukanpelanggaran.....	63
Tabel IV.5PanitiaPemilihanKepalaDesaKenantanTahun 2007.....	66
Tabel IV.6PanitiaPemungutanSuaraPemilihanKepalaDesaKenantan.....	67
Tabel IV.7Pembukuan Yang DilakukanOleh Bpd TentangAspirasiMasyarakat Yang Di Terimaoleh BPD .....	70
Tabel IV.8 Penyusunan Tata Tertib BPD .....	73
Tabel IV.9 Pemahaman BPD TerhadapPelaksanaanWewenang BPD .....	76
Tabel IV.10 ProfesiAnggota BPD SelainKeanggotaannyaSebagai BPD.....	80

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan dimana daerah-daerah dibagi-bagi oleh negara menjadi Provinsi-Provinsi dan Kabupaten-Kabupaten. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Kemudian pasal 2 menyatakan, Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh sepenuhnya oleh majlis permusyawaratan rakyat.<sup>1</sup>

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintahan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa<sup>2</sup>.

Dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 lahir menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 hal ini semakin dipertegas dalam Pasal 200 ayat (1), bahwa dalam Pemerintahan Daerah

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun Tahun 2000*, Sinar Grafika, 2000, pasal 1.

<sup>2</sup> Siswanto Sunaryo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2006 h. 35

Kabupaten Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai wujud Demokrasi, maka di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa<sup>3</sup>. Dengan adanya pembagian kekuasaan ( Distribusi of Power) dalam pemerintahan desa ini, membawa harapan akan menjadikan desa sebagai tempat tegak dan bermulanya otonomi serta demokrasi di Indonesia khusus untuk BPD, diharapkan menjadi arena baru tempat pembuatan kebijakan publik yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat, serta mampu melakukan kontrol terhadap sepak terjang Pemerintah Desa.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab XI. Berdasarkan Pasal 104, BPD adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang fungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Desa (PERDES). Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa. Peraturan tentang desa tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tapi juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah RI

---

<sup>3</sup> H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo persada Jakarta: 2007, h. 93.

(PPRI Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang<sup>4</sup>.

Dalam Perda Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2007 (Pasal 1 No 9) juga di jelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa masing-masing unsur Pemerintahan Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan rnendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat

---

<sup>4</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang pedoman Umum Pengatuan Mengenai Desa" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, pasal 30-32.*

kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain :<sup>5</sup>.

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra,
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai,
3. Adanya prinsip saling menghormati,
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Peraturan Undang-Undang yang berlaku ini disebutkan dan dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD berfungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun Warga Pemanggu adat dan tokoh masyarakat. masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk

---

<sup>5</sup>Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek pengembangan Desa*, CV Fokusmedia, Bandung. Tahun 2007, h.36

satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan yang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun yang menjadi wewenang BPD sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 4, PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa<sup>6</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang yang pertama yaitu: "Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Kemudian wewenang yang kedua menurut PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. wewenang yang ketiga menurut PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

---

<sup>6</sup> pasal 4, *PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa*



- d. Wewenang yang Keempat menurut PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. wewenang yang kelima menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Wewenang yang keenam dalam PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu wewenang menyusun tata tertip BPD.
- g. Wewenang yang ke tujuh dalam PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam hal anggota BPD tidak mengusulkan pemberhentian kepala desa yang di sebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya, maka bupati dapat memberhentikan tanpa usulan dari BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana lembaga Legislatif tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa terutama dalam pelaksanaan Peraturan Desa (PERDES) dan peraturan kepala desa apakah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsi kontrol atau pengawasan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hendaknya diarahkan pada upaya terselenggaranya pemerintahan desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih serta mampu memberikan perubahan bagi terciptanya pemerintahan desa yang baik. Dan perannya sangat dituntut oleh masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pembangunan, maupun pemberdayaan, dan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya khususnya Desa Kenantan kecamatan tapung.

Namun dalam pelaksanaannya yang terjadi dilapangan, pelaksanaan wewenang BPD tersebut kurang optimal. Dalam pasal 4 huruf b PERDA KAMPAR No.9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Terhadap pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa nomor 1 tahun 2010 tentang “Pungutan Fie Pengumpulan Pekarangan Dan TBS Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Desa Kenantan”. Adanya indikasi penyelewengan dana yang dilakukan oleh pemerintahan desa terhadap pungutan tersebut. Dimana dalam PERDES tersebut sudah diatur mengenai bentuk pengawasan yang di atur di dalamnya. Dalam pasal 14 PERDES Nomor 1

Tahun 2010 tentang Pungutan Fie Pengumpulan Pekarangan Dan TBS Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Desa Kenantan dijelaskan bahwa komisi 1 BPD memiliki kewenangan sebagai pengawas untuk melakukan penyidikan atas tindak pelanggaran terhadap paelaksanaan pungutan desa, berdasarkan surat perintah tugas penyidikan yang dilakukan oleh BPD.

Dengan belum terlaksananya pengawasan terhadap PERDES tersebut belum di ketahui apakah benar telah terjadi penyelewengan dana tersebut atau tidak. Oleh karena itu BPD harus mempunyai peran aktif dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa. Karena fungsi dari BPD itu sendiri sebagai pengawasan, jadi tanpa pengawasan yang optimal bisa mengakibatkan kendala dalam menjalankan program yang sudah dirancang.

Dalam pasal 8 PERDES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pungutan Fie Pengumpulan Pekarangan Dan TBS Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Desa tersebut di jelaskan pengumpul TBS pekarangan dan TBS KPTD di kenakan pungutan sebesar Rp.500.000,00 rupiah perbulan untuk setiap pengumpul dan di kenakan potongan sebesar Rp.170,00 rupiah untuk setiap perkilogramnya. Jadi setiap pengumpul TBS pekarangan dan TBS KPTD dikenakan pungutan Rp.500.00,00 rupiah di tambah dengan banyak jumlah Tandan Buah Segar (TBS) yang di peroleh pengumpul di potong sebesar Rp.170,00/Kg. Apabila pengumpul mendapatkan 1 ton Tandan Buah Segar (TBS) dengan harga Rp.1000,00/kg, pengumpul harus membayar sebesar Rp.170.000,00 rupiah di tambah Rp.500.000,00 rupiah. Jadi pengumpul harus membayar Rp.670.000,00 rupiah setiap bulannya yang harus diterima Desa.

Sebagai wadah demokrasi masyarakat mempunyai harapan besar terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya dalam menyampaikan pendapat dan apa yang menjadi keinginan masyarakat serta masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui setiap kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat tetapi juga berperan penting dalam pemerintahan desa selaku badan legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta tindakan dan keputusan yang dibuat kepala desa menyangkut kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, khususnya tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan Badan Permusyawaratan Desa yaitu dengan judul: **PELAKSANAAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KENANTAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 9 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap pelaksanaan wewenang, kendala-kendala, dan upaya untuk mengatasi pelaksanaannya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan PERDA No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan wewenangnya berdasarkan PERDA No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Untuk mengetahui tentang kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan wewenangnya di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis berharap dengan adanya penulisan ini, penulis dapat memahami bagaimana pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Merupakan bahan masukan bagi penulis dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Bagi desa, tulisan ini penulis harapkan nantinya menjadi masukan bagi pemerintah desa dan badan Permusyawaratan desa tersebut. menjadi masukan bagaimana pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Bagi pembaca, penulis harapkan akan memberikan pemikiran baru dan informasi tentang bagaimana pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **F. Metode Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. **Lokasi Penelitian.**

Sesuai dengan pokok permasalahan Penelitian ini dilakukan Di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### 2. **Subjek dan Objek Penelitian**

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Desa dan seluruh anggota BPD yang berada di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### 3. **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kesatuan atau himpunan dengan ciri yang sama . populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota dari BPD yang berjumlah 9 orang.

Dari keseluruhan populasi di atas yaitu sebanyak 9 orang, maka penulis akan menjadikan semuanya sebagai Sampel.

### 4. **Sumber Data.**

- a. Data Primer : yaitu yang di peroleh langsung dari hasil penelitian melalui dokumen-dokumen dan wawancara langsung

dengan responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis.

- b. Data Skunder : merupakan data-data penunjang yang penulis kumpulkan melalui buku-buku kepustakaan sebagai bahan hukum primer, terutama buku-buku dan literature yang berkaitan dengan masalah wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu peninjauan langsung di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang di teliti.
- c. Angket yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan wewenang BPD. Dalam hal ini responden hanya memilih jawaban yang ada di dalam angket sehingga di peroleh keterangan secara langsung.



- d. Analisis Dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di teliti.

## **6. Metode Analisa Data**

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

## **7. Teknik Penulisan**

- a. Deduktif yaitu penulisan berusaha mengemukakan kedah-kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah-kaedah, subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penulisan ini agar dikembangkan sesuai dengan kerangka penulisan ini, penulis mencoba menguraikan pokok yang ada pada masing-masing bab seperti dibawah ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM DESA KENANTAN KECAMATAN. TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

Bab ini akan membahas mengenai sejarah singkat Desa Kenantan, kondisi geografis, gambaran umum demografis, kependudukan, pendidikan, kondisi ekonomi, Kamtibmas dan Partisipasi Masyarakat.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini akan membahas mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Kemerdekaan dan Era Pemerintahan Orde Lama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Era Pemerintahan Orde Baru, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Era Reformasi, dan gambaran umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenantan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membahas rancangan Peraturan Desa, melaksanakan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun tata tertib BPD dan kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan wewenangnya, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan wewenang BPD, faktor usia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya

kesadaran hukum anggota BPD, kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya untuk membantu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Adapun peneliti melaksanakan penelitian di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam bab ini akan di jelaskan tentang gambaran umum atau sejarah singkat lokasi penelitian yaitu di Desa Kenantan.

#### **A. Sejarah Desa Kenantan<sup>7</sup>**

Desa Kenantan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Desa Kenantan mulai terbentuk pada Tahun 1991 melalui Program Pemerintah Transmigrasi Pola PIR. Dengan Transmigran mayoritas dari P. Jawa = 400 KK dan 100 = KK dari Penduduk Lokal Petapahan. Jumlah Transmigran: 500 = KK. Pemukiman baru pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman ( KUPT ) dari Departemen Transmigrasi yang bernama Mirzal.

Tanah yang di gunakan untuk lokasi Desa Kenantan berasal dari Tanah Wilayah Petapahan yang kemudian ditata oleh Pemerintah dengan Program Transmigrasi.

Di akhir Tahun 1994 pengelolaan desa dalam rangka persiapan Desa Devinitif, diadakan Pemilihan Kepala Desa yang pertama masih bersifat PJS. Di antara tiga calon yang terpilih sebagai Pjs. Kepala Desa Bpk. Slamet Riyadi.

---

<sup>7</sup> Data diperoleh dari Profil Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Pada masa Pemerintahan ( Pjs. ) Kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Kenantan banyak digunakan untuk menata Kelembagaan Kelompok Masyarakat, walaupun masih bersifat sederhana. Mulai dari pembagian RT dan RW yang kemudian berkembang dan terhimpun dalam Wilayah Dusun. Disamping pembagian Kelompok Lingkungan, juga diadakan pembagian kelompok - kelompok pertanian yang lain.

Kegiatan kelompok masyarakat pada saat itu sebagian besar bekerja pada sektor perkebunan dan sebagian kelompok lain pada sektor pertanian. Dari kelompok-kelompok itu terbentuk 26 Kelompok Tani yang masih aktif sampai dengan saat ini.

Setelah satu periode dalam kurun waktu 5 Tahun" bertepatan dengan selesainya masa pembinaan dari Transmigrasi, habis juga masa jabatan Pjs KepalaDesa.

Di akhir Tahun 1999 berlangsung penyerahan pembinaan desa dari Departemen Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah, dan status Desa Kenantan menjadi Desa Devinitif dibawah pembinaan Pemerintah Daerah pada lingkup Departemen Dalam Negeri.

Disaat itulah diadakan pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya, Dengan pemilihan langsung atas 3 Calon :

- a. Bpk.Handoyo

- b. Bpk. Ruslan
- c. Bpk. Mujmal.

Dan yang terpilih sebagai Kepala Desa Devinitif Bpk. Ruslan. Dalam masa jabatan 8 Tahun Pemerintahan Kepala Desa Bpk. Ruslan berakhir pada Tahun 2007, dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa yang ketiga kalinya di Desa Kenantan. Dari tiga Calon yang sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana Pembangunan Desa Kenantan kedepan. Yang terpilih untuk memimpin Pemerintahan Desa Kenantan sebagai Kepala Desa: Heri Suprihanta, melalui : 1.141 Hak Pilih, dengan jumlah suara :

- a. Suroto :419 suara
- b. Sri Wahono :176 suara
- c. Heri Suprihanta :510 suara
- d. Batal :36 suara

#### B. **Kondisi Geografis.**<sup>8</sup>

Desa Kenantan merupakan salah satu desa Ex Transmigrasi yang terdekat dengan Ibu kota Kecamatan Tapung dan terletak tidak jauh ( 1000 M ) dari Jalan Raya Petapahan- Bangkinang, atau antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota

---

<sup>8</sup> Data diperoleh dari Profil Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Kabupaten. Disamping posisi desa yang tidak jauh dari Jalan Ray4 juga terlintasi jalan yang menghubungkan antara tiga desa tetangga menuju Kantor Camat.

Meski keberadaan Desa Kenantan telah berusia dua puluhan tahun, namun selama ini baru sebagian kecil atau instansi terkait yang kenal dengan Desa Kenantan. Adapun pengenalan Desa Kenantan secara umum setelah adanya Bantuan Pengaspalan dari Pemda pada akhir 2009, disusul dengan tegaknya Gapura Gerbang Masuk yang dibangun dengan swadaya masyarakat melalui Dana PAD T.A. 2009.

Keadaan tanah sebagian bergelombang dan pada umumnya tanah di desa ini bersifat pasir yang kurang cocok dimanfaatkan untuk bercocok tanam sayur mayur, palawija dan tanaman muda lainnya. Dari sifat tanah tersebut rupanya telah diantisipasi oleh Pemerintah sebelum penempatan di desa ini, bahwa tanaman yang cocok adalah tanaman Kelapa Sawit sebagaimana yang ada pada saat ini, meskipun harus diimbangi dengan perawatan dan pemupukan yang intensif.

### **C. Gambaran Umum Demografis.<sup>9</sup>**

Wilayah Desa Kenantan seluas 1A4l lfa. Dengan batas- batas wilayahtr sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkebunan Inti (Desa Petapahan)
- Sebelah Timur : Perkebunan Plasma (Desa Sibua)

---

<sup>9</sup> Data diperoleh dari Profil Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar



- Sebelah Selatan :Desa Muara Mahat Baru
- Sebelah Barat : Perkebunan Plasma ( Desa Muara Mahat Baru)

Bagian dari wilayah tersebut terdiri atas 3 fasilitas pemanfaatan:

- a. Fasilitas Perkebunan : .....1000 Ha
- b. Fasilitas Umum & Pemukiman : .....405,5 Ha
- c. Fasilitas Jalan : .....35,5 Ha

#### **D. Kependudukan<sup>10</sup>**

Perkembangan penduduk tahun 2010 cenderung sedikit meningkat berkisar 66 jiwa :

- Dari jumlah awal tahun : 2086 jiwa
- Akhir tahun berjumlah :2152 jiwa

**Tabel. II.1.**  
**Perincian Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan:**

PETANI	PEDAGANG (PENGUSAHA KECIL)	PNS	BURUH	KARYAWAN SWASTA	LAIN-LAIN
334	59	23	143	35	1558

*Sumber Data: Profil Desa Kenantan, Tahun 2010*

---

<sup>10</sup> Data diperoleh dari Profil Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

## E. Pendidikan<sup>11</sup>

**Tabel.II.2**  
**Fasilitas Pendidikan**

No	NAMA SEKOLAH	GEDUNG SEKOLAH		JUMLAH GURU		KEADAAN MURID		
		KELAS	KANTOR	PNS	HONORER	L	P	JUMLAH
1	TK ALHIDAYAH	3	-	1	4	41	30	71
2	SD 016	11	2	10	8	140	129	269
3	SD 031	8	1	0	4	107	103	71
4	MDA MTS	4	1	-	5	61	61	116
5								
6								

*Sumber Data: Profil Desa Kenantan, Tahun 2010*

**Tabel. II.3**

### Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk

PRA SEKOLAH	SD	SLTP	SLTA	SARJANA	PASCA SARJANA
271	1143	400	315	23	0

*Sumber Data: Profil Desa Kenantan, Tahun 2010*

## F. Kondisi Ekonomi<sup>12</sup>

Warga Masyarakat Desa yang berawal sebagai Transmigran Pola PIR dengan jenis Perkebunan Kelapa Sawit, pada umumnya dapat merubah perekonomian, baik untuk masyarakat intern khususnya dan pada umumnya dapat berpengaruh pada

<sup>11</sup> Data diperoleh dari Profil Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

<sup>12</sup> Data diperoleh dari Profil Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

tingkat perekonomian Desa tetangga. Bahkan setidaknya dapat membantu peningkatan aset bagi Pemerintah Daerah. Sebaliknya bagi masyarakat sendiri bila dibandingkan dari hasil produksi dengan kebutuhan pupuk dan perawatan lainnya serta kebutuhan sehari-hari yang bervariasi, pada akhirnya tingkat perekonomian masyarakat secara otomatis juga bervariasi: ada yang ada yang menengah kebawah, bahkan ada pula yang masih tergolong kurang mampu.

#### **G. Kamtibmas dan Partisipasi Masyarakat.<sup>13</sup>**

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat cukup terkendali, dengan adanya 20 Pos Kamling dan Pelaksanaan Ronda Malam yang di pandu oleh 13 Anggota Linmas, dan selalu adanya pantauan dari Pemerintahan Desa. Disamping kepedulian keamanan, partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam bentuk Gotong Royong dan pengumpulan Dana untuk meningkatkan Pembangunan Fisik, sebagai tambahan dari Bantuan Pemerintah Kabupaten baik dari Dana ADD maupun Pembangunan dari Dana APBD.

Jumlah anggota BPD ditentukan dengan jumlah penduduk desa tersebut. Anggota BPD di desa kenantan berjumlah 9 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 2152 jiwa. Jumlah anggota tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kab.Kampar No 9 Tahun 2007 (Tentang Badan Permusyawaratan Desa) di jelaskan bahwa jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 9 orang

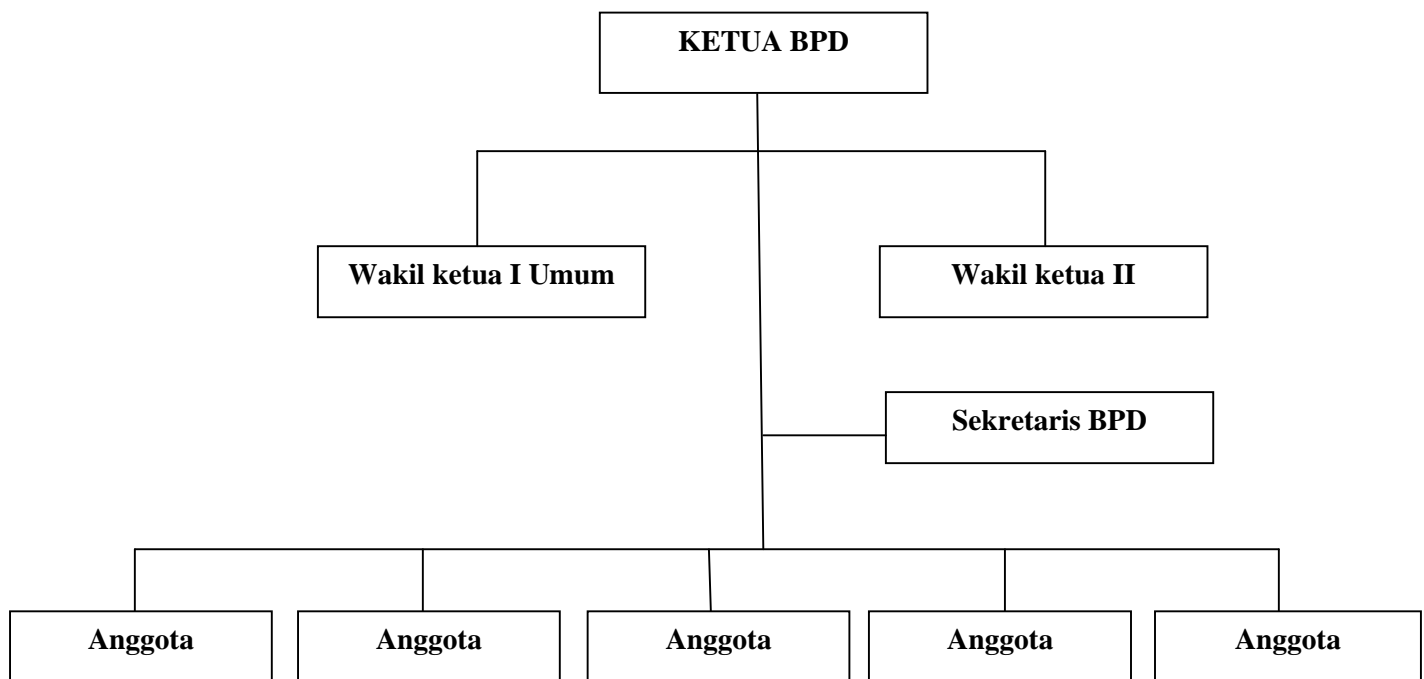
---

<sup>13</sup> Data diperoleh dari Profil Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

anggota BPD. Dan jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 sebanyak 7 orang anggota BPD. 8 Peraturan Daerah Kab.Kampar No 9 Tahun 2007 (Tentang Badan Permusyawaratan Desa) di jelaskan bahwa jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 9 orang anggota BPD. Dan jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 sebanyak 7 orang anggota BPD. Berikut adalah bagan organisasi Badan permusyawaratan Desa Kenantan:

**Gambar. 2.1**

**Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kenantan.**



*Sumber Data: Dari Sekertariat BPD Di Kantor Desa Kenantan*

Pada periode 2008-2014 jumlah keanggotaan BPD desa kenantan beranggotakan 9 orang, dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun. Anggota BPD Desa Kenantan periode 2008-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. II.4**  
**Data Anggota BPD Desa Kenantan Priode 2008-2014.**

no	NAMA	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	K.SLAMET RIADI	ISLAM	KETUA	SLTA
2	OBER SIRAIT	ISLAM	WAKIL KETUA 1	SLTP
3	H. JAMILUS	ISLAM	WAKIL KETUA 2	SLTP
4	ASTUTI RAHAYU	ISLAM	SEKERTARIS	SLTA
5	H.SUJARWO	ISLAM	ANGGOTA	SLTA
6	YAHMIN	ISLAM	ANGGOTA	SLTA
7	SUSILO	ISLAM	ANGGOTA	SLTA
8	M. IIMAM BISRI	ISLAM	ANGGOTA	SLTA
9	SUMINI	ISLAM	ANGGOTA	SLTA

*Sumber Data: Dari Sekertariat BPD Di Kantor Desa Kenantan*

### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

##### A. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia.**

Dalam teori Hukum Tata Negara, pembagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal adalah pembagian tugas dan atau wewenang menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan petugas lain yang ruang lingkupnya berbeda.<sup>14</sup>

pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatannya yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau wewenangnya mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatannya dengan petugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukannya dapat melimpahkan tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi dalam konsep Negara kesatuan, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertikal.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa di bumi nusantara ini bukan adopsi dari sistem negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia. Keaslian itu

---

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamil, *pengantar hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005 h. 89

<sup>15</sup> *Ibid...*

diakui oleh **van vollenhoven** dalam bukunya *Staatsrecht overze* bahwa pada tahun 1996 ketika kapal berbendera Belanda yang pertama memasuki perairan kepulauan Indonesia wilayah ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang “liar dan kosong”. Di sana terdapat setumpuk lembaga-lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa, persekutuan-persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.<sup>16</sup>

Untuk Pemerintahan Desa sebenarnya tidak ada ketentuan Perundangan Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa desa merupakan Daerah Otonom, namun dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat adalah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Dari ketentuan ini dapat kita menyimpulkan bahwa kalimat "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat". ini dapat diartikan Desa adalah daerah otonom karena adanya kewenangan yang diberikan perundangan-undangan kepada desa untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat desa setempat, yang

---

<sup>16</sup> Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2005, h. 144

mana kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri merupakan inti makna dari istilah otonomi.

secara umum desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan 'peradaban' yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian.<sup>17</sup> Penyebutan desa lebih akrab ditelinga orang Jawa, Madura dan Bali, Dusun dan Marga (sumatraa selatan), Dusundati (Maluku), Kuta atau Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Aceh menyebutnya Gampong dan Meunasah untuk daerah hukum yang paling bawah.

Sedangkan sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda pada tiap-tiap bagian daerah seperti di daerah Tapanuli Kepala Desa disebut Kepala Nagari, di Sumatra Selatan disebut dengan nama Pesirah, di daerah Jawa disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut Tembukung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di berbagai daerah di papua disebut Kurano. Masih banyak lagi sebutan yang bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama.<sup>18</sup>

Susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonoi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Jogyakarta: 2001, h. 9

<sup>18</sup> Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, CV Fokus Media, Bandung: 2007, h. 9

<sup>19</sup> *Ibid.*



1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Selain dari pada itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa yaitu:

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif berserta penggunaanya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. penduduk adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (rural society).<sup>20</sup>

Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h.10

suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam.<sup>21</sup>

Dari sudut pandang politik dan administrasi pemerintahan, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Pengertian tersebut termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979, dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999. Namun demikian dalam pengertian ini, masih belum menggambarkan secara jelas mengenai kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa .<sup>22</sup>

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini Desa adalah suatu masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

---

<sup>21</sup> Suhartono, dkk, *Op. Cit*, h.10

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 14

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat bertambah. Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang merealisasikan aspirasi yang berkembang.

Dari berbagai pengertian desa tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan ada beberapa ciri desa secara umum:<sup>23</sup>

- a) Desa umumnya terletak sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
- b) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
- c) Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat.
- d) Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”.
- e) Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
- f) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat dari pada kota. .

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 16

Berdasarkan aspek yuridis formal, maka perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai produk Perundang-Undangan yang mengatur tentang desa. Mulai dari Pasca masa kemerdekaan hingga produk hukum Pemerintahan Republik Indonesia sekarang.

Penulis akan memaparkan tentang bagaimana Pemerintahan Desa terutama Badan permusyawaratan Desa (BPD) pada masing-masing masa tersebut di atas.

# **1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Kemerdekaan dan Era Pemerintahan Orde Lama (1945-1960).**

Sejak awal kemerdekaan Pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan Desa. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor II disebutkan bahwa Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuurundelandschappen dan Volksgemmenenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut.

Peraturan perundang-undangan pertama yang dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1965 tentang Desa praja. Dengan dibentuknya undang-undang ini maka semua peraturan perundangan yang berlaku

sebelumnya seperti IGO (*Inlandsche Gemente Ordonantie*) dan IGOB (*Inlandsche Gemeente Nantie Buitengewesten*) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun yang dimaksud dengan desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memiliki penguasa dan mempunyai harta benda sendiri.<sup>24</sup> Badan musyawarah desa praja adalah sebagai badan perwakilan dari masyarakat desa praja dan cara pemilihan dan pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I.

Undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya disebabkan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI yang telah menimbulkan dampak berbagai macam kehidupan sehingga mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Seiring dengan itu, Pemerintahan Orde membuat kebijakan untuk menitik beratkan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 perlu ditinjau kembali sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 1966 tentang Penundaan Realisasi Pembentukan Desa Praja. Akibatnya ditunda berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 daerah mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pemilihan kepala desa. Agar ada pedoman secara nasional maka pada Tahun 1978 ditetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun

---

<sup>24</sup> Dasril Radjab, *Op. Cit*, h. 144-145

1978 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.<sup>25</sup>

## **2. Badan Permusyawaratan Desa Pada Era Pemerintahan Orde Baru.**

Satu tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang pemerintahan Desa. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1965 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti. Undang-undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Selanjutnya undang-undang ini mengatur dua organisasi pemerintahan terendah dibawah kecamatan, yakni desa dan kelurahan. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, mempunyai organisasi terendah langsung di bawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 146

<sup>26</sup> *Ibid*. h. 148.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa "sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku". Namun upaya penyeragaman pengaturan masyarakat desa justru menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 ini menyatakan, bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada yang mengatur desa yaitu *Inlandsche Gemeete Ordonnantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengwesten* (IGOB) yang berlaku diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri yang terkadang-kadang dianggap merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Jadi, secara formal dan eksplisit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ditujukan untuk melakukan penyeragaman bentuk terhadap keanekaragaman tata pemerintah desa yang ada. Tujuan politisnya adalah untuk melakukan

---

<sup>27</sup> Wasistiono, *Op. Cit*, h.21-22

intervensi dan standarisasi yang diinginkan oleh rezim orde baru agar ia dapat mengendalikan semua level pemerintahan secara penuh. Kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.<sup>28</sup>

Pemerintah Desa menurut undang-undang ini adalah terdiri dari Kepala Desa Dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam hal ini Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>29</sup>

Dalam Fasal 17 ayat (1) undang-undang Nomor. 5 Tahun 1979 Lembaga Musyawarah Desa (LMD) keanggotannya terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan. LMD merupakan wadah dan penyalur pendapat, permusyawaratan serta pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa saat mengambil bagian dalam pembangunan desa, Tujuan pembentukan LMD ialah untuk menrperkuat pemerintahan desa dan mewadahi pelaksanaan demokrasi Pancasila di desa. Pembentukan LMD dilakukan dalam musyawarah dengan seluruh pemuka masyarakat yang ada di desa. Hasil musyawarah disampaikan kepada camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota Madya untuk rnendapat pengesahan dengan surat keputusan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Maryuni, *Alokasi Dana Desa formulasi dan Implementasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2002, h. 10

<sup>29</sup> Soewarno Handajaningrat dan R.Hindratmo, *Landasan dan Pedomen Kerja Administrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa*, CV. Haji Masagung, Jakarta:1993, h.77

<sup>30</sup> Dasril radjab, *Op. Cit*, h.151



### 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Era Reformasi.

Pada masa ini Desa memasuki babak baru, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999 yang merupakan solusi yang manusiawi dan paling canggih bagi pengelola pemerintahan dan pembangunan. Dari sisi desentralisasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 secara signifikan memberi penghargaan terhadap keragaman lokal, membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk menemukan identitas lokal yang telah lama hilang selama penerapan undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979, mengurangi kontrol Negara terhadap desa, serta sedikit banyak memberikan kewenangan untuk memperkuat eksistensi dan otonomi desa. Jika dibawah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terendah dibawah camat maka di bawah Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 desa ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

---

<sup>31</sup> Abdul Rozaki, dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, ires pres, Yogyakarta : 2005, h.11

Demokrasi desa mengalami lompatan yang luar biasa. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah membuka ruang politik yang lebih inklusif serta memotong sentralisme dan otokratisme di tangan "penguasa tunggal" kepala desa. Masyarakat desa sekarang jauh lebih kritis menuntut kinerja kepala desa lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola kebijakan dan keuangan desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan desa (BPD) menjadi aktor baru pendorong demokrasi. Masyarakat berharap bahwa kehadiran BPD menjadi dorongan baru bagi demokrasi desa yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat pembuat kebijakan secara partisipatif masyarakat dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat. Bersama sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa (PERDES), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDES, APBD serta keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD sendiri dalam Pasal 1 Huruf b Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara Lembaga Pemerintahan Desa dan BPD merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

Dalam Pasal 1 huruf (o) undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa,

"Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan ini mengandung semangat untuk mengembalikan Desa menurut asal usul dan adat istiadat dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun kekeliruan terbesar dari ketentuan ini adalah membatasi keberadaan Desa hanya pada wilayah kabupaten. Konsekuensi yang terjadi pada saat itu adalah seluruh Desa yang berada di wilayah Kota berubah menjadi Kelurahan, dan Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten berubah menjadi Desa. Wacana Demokrasi dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa" dan Keputusan Kepala Desa, dan juga sebagai sarana penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa bersangkutan.

Kehadiran BPD dengan fungsi dan wewenang yang dimilikinya memungkinkan adanya keseimbangan dan fungsi saling mengawasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga keberadaan kepala desa yang ada pada orde baru seperti " Penguasa tunggal" di desa tidak akan terjadi lagi. pemilihan dan perwakilan merupakan indikator minimal demokrasi prosudural yang harus ada dalam pemerintahan Desa.

Agar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 khususnya mengenai peraturan yang mengatur tentang pemerintahan Desa dapat dilaksanakan dengan baik maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dalam Pasal 31 PPRI No. 76 Tahun 2001 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Daerah. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam pasal 32 yaitu berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya lima orang anggota.

Penggantian undang-undang No. 22 Tahun 1999 dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004. khusus materi muatan tentang pemerintahan desa, membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka penyesuaian dengan isi Pasal 18 B UUD 1945 dan Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. Demikian pula Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD.

Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan koreksi atas kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan pengorngnatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalanya pengertian Desa dan kawasan perdesaan, pembentukan, penggabungan/penghapusan desa sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan masyarakat di desa, keuangan desa, kerjasama desa, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa.<sup>33</sup> Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini memberi peluang kepada masyarakat hukum adat memilih Kepala Desa atau sebutan lain menurut hukum adatnya. Selain itu juga tata cara pemilihan baik pemilihan kepala desa di luar maupun di dalam masyarakat hukum adat akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala Desa

---

<sup>32</sup> Pasal 1, *Ketentuan Umum (12), Undang-Undang No.32 Tahun 2004*

<sup>33</sup> Pasal 200, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lagi bertanggung jawab kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD), tetapi cukup memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) yang tidak membawa konsekuensi langsung pemberhentian Kepala Desa Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk I kali masa jabatan berikutnya.<sup>34</sup>

Adapun Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan rnenyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinannya dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lajut dengan peraturan daerah.<sup>35</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang No.22 Tatrun 1999, keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) juga berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Meskipun Badan perwakilan Desa berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tidak memeiliki fungsi pengawasan kontrol terhadap Kepala Desa, tetapi dari sisi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbuka dengan diberikannya dua fungsi kepada Badan Permusyawaratan Desa yang dulu dimiliki

---

<sup>34</sup> Dasril Radjab, *Op. Cit*, h. 158

<sup>35</sup> *Ibid....*

oleh BPD berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yaitu berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan menetapkan perdes, fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana penting bagi pelebagaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang selarna ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat . Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa juga harus dapat menjalankan fungsi utama yakai fungsi representasi.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 34 juga menjelaskan tentang berfungsi BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa" menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bahkan dalam PPRI No. 72 ini juga menjelaskan lebih rinci tentang tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

#### **B. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa**

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur, bahwa pada Pemerintahan Desa terdapat dua unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan BBD sebagai unsur legislatif. Undang-Undang ini memberikan penegasan terhadap adanya pembagian kekuasaan pada pemerintah desa. Sebelum

Undang-Undang ini lahir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang merupakan landasan hukum pemerintahan desa Era Orde Baru sebenarnya juga mengenal suatu lembaga yang menyerupai BPD, yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Meski pada prinsipnya ada pembagian kekuasaan, tetapi kekuasaan legislatif yang berarti LMD bukanlah wadah representasi dan arena Check and Balances terhadap Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005. Dalam Peraturan undang-undangan yang berlaku ini disebutkan dan dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD berfungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun warga, pemanggu adat dan tokoh masyarakat. masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan



yang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.<sup>36</sup>

Agar penafsiran ini dapat dilaksanakan dengan baik di setiap Daerah, Maka di setiap Daerah Kabupaten diperlukan Peraturan lebih lanjut yang disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau yang disebut dengan PERDA khususnya mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk daerah Kabupaten Kampar, BPD diatur dalam Perda No. 09 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Perda No. 09 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun yang menjadi wewenang BPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor. 09 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

---

<sup>36</sup> Pasal 13, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang desa*

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.
- g. dalam hal anggota BPD tidak mengusulkan pemberhentian kepala desa yang disebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya. Maka bupati dapat memberhentikan tanpa usulan dari BPD.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima ) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. Dimana anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan dengan membentuk Panitia musyawarah yang terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh Pemuda, tokoh Perempuan, tokoh adat dan pengurus lembaga kemasyarakatan.

Adapun syarat calon anggota BPD yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

---

<sup>37</sup> Pasal 4, *Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.

- b) Bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (bulan) berturut-turut;
- c) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) dan/atau sederajat dan apabila tidak memiliki ijazah maka harus memiliki surat keterangan pengetahuan yang sederajat dari kepala desa;
- d) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan kurang dari 60 tahun;
- e) Sehat jasmani dan rohani; Tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
- f) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g) mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat; Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h) khusus ketua RW dan ketua RT minimal memegang jabatan tersebut selama 6 (enam) bulan sebelum pemilihan.<sup>38</sup>

Dimana masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat dan ditunjuk kembali untuk I kali masa jabatan berikutnya. pimpinan BPD terdiri dari I (satu), orang Ketua 1 (satu), orang wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.

---

<sup>38</sup> Pasal 11, *Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor. 09 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenantan Berdasarkan Perda Nomor. 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kenantan sekarang adalah merupakan wakil dari penduduk desa ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Kampar untuk periode 2008 sampai 2014 dengan mengucapkan sumpah/janji secara bersama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati Kampar atau pejabat yang ditunjuk Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagai wakil dari masyarakat, harus menjalankan apa yang sudah menjadi kewenangannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana yang telah dipercaya oleh msyarakat sebagai perwakilan untuk mengawasi kinerja dari Pemerintahan Desa dan Kepala Desa. Dengan menjalankan wewenangnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di desa kenantan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar (PERDA) Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Wewenangnyanya yang telah di uraikan sebelumnya adalah **Pertama:** Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, **Kedua:** Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa., **Ketiga:** Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, **Keempat:** Membentuk panitia pemilihan kepala desa, **Kelima:** menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, **Keenam:** Menyusun tata tertib BPD, yang **Ketujuh:** merujuk pada wewenang yang ketiga tentang pemberhentian kepala desa yang berisi tentang BPD tidak mengusulkan pemberhentian kepala desa yang disebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya, maka bupati dapat memberhentikan kepala desa tanpa usulan dari BPD.

**Tabel. IV.1**  
**Jawaban Responden Tentang Peraturan Yang di Gunakan Bpd Dalam Melaksanakan Wewenangnyanya.**

NO	JAWABAN	jawaban responden	persentase
1	a: Undang-Undang RI no 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah		
2	b: Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005	2	22,22%
3	c: Perda Kab Kampar no 09 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	7	77,78%
Jumlah		9	100%

*Sumber Data: Olahan Data Tahun 2012*

Dari data yang di dapat dari jawaban responden di atas sudah jelas bahwa 77,78% dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenantan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai acuan atau pegangan dalam melaksanakan wewenangnya. Namun pada pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri tidak mengetahui isi dari peraturan tersebut. Dalam pasal 8 huruf b di jelaskan bahwa jumlah anggota BPD di tentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan huruf (b) jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 7 orang anggota. Sedangkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang saat ini menjabat sebanyak 9 orang anggota.

Menurut penjelasan dari pemerintahan desa (berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.Heri Suprihanta sebagai Kepala Desa Kenantan) bahwa jumlah anggota BPD Saat ini yang berjumlah 9 orang mengikuti jumlah anggota sebelumnya tanpa melihat atau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 09 Tahun 2007<sup>39</sup>.

Berikut ini akan diuraikan oleh penulis mengenai bagaimana pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenantan yang di bentuk pada tahun 2008 dan seharusnya berakhir pada Tahun 2014 yang sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun.

---

<sup>39</sup> Heri Suprihanta, *hasil wawancara*, Kepala Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 15 oktober 2012)

## 1. Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.

Agar Peraturan Desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara Pemerintahan Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa<sup>40</sup>.

Dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan juga menjadi tugas Pemerintah Desa, dalam pasal 209 undang-undang nomor 32 tahun 2004 di sebutkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian peraturan mengenai peraturan desa di atur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun2005 tentang desa.

Dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 (Tentang Desa) disebutkan bahwa:

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

---

<sup>40</sup> HAW. widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta:PT. raja Grafindo, 2003), h. 94.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pasal 4 huruf (a) PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa BPD mempunyai wewenang membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa<sup>41</sup>. BPD harus bekerja sama dengan kepala desa agar tercapainya pelaksanaan pembangunan desa dan pelayanan terhadap masyarakat karena BPD merupakan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan semua aspirasi masyarakat.

**Tabel. IV.2**

**BPD Desa Kenantan Membahas Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**

NO	JAWABAN	jawaban responden	persentase
1	a. Ada	9	100%
2	b. tidak ada		
3	c. tidak tahu		
Jumlah		9	100%

*Sumber Data: Olahan Data Tahun 2012*

---

<sup>41</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, pasal 30-32.



Dari tabel di atas bisa di jelaskan bahwa seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan wewenangnya yang pertama yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, telah terlaksana.

Berdasarkan penjelasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (wawancara dengan Bpk Slamet Riadi selaku ketua BPD) bahwa kepala desa memberikan undangan dan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengadakan rapat guna membahas rancangan peraturan desa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari Tahun 2010<sup>42</sup>.

Dari penjelasan dia atas dapat di simpulkan bahwa wewenang yang pertama membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah terlaksananya dan sudah di sahkannya Peraturan Desa tersebut yaitu Peraturan Desa Kenantan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pungutan Fie Pengumpulan TBS Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Desa Kenantan.

---

<sup>42</sup> Slamet Riadi, *hasil wawancara*, Ketua BPD Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 16 oktober 2012)

## **2. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.**

Wewenang yang ke dua yang di atur dalam pasal 4 huruf b PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah kewenangan dalam hal pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Salah satu tujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan atau pemerintah yang otoriter dan agar terciptanya keseimbangan dan fungsi saling mengawasi (*ceck and balance*) antar lembaga yang mempunyai kedudukan sama di Pemerintahan.

Pengawasan yang di lakukan Badan permusyawaratan Desa (BPD) haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mengawasi peraturan desa dan peraturan kepala desa, Agar tidak terjadi ke salahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengawasi pemerintahan desa dan Peraturan kepala desa dalam menjalankan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Apabila ada terjadi kenjanggalan dan indikasi penyelewengan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan pengawasan dengan mencari keterangan-keterangan terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan. Dan juga terhadap kepala desa untuk di minta pertanggung jawabannya apabila telah terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh kepala desa baik terhadap

masalah tentang Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. Dalam pasal 5 PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di sebutkan bahwa BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada pemerintah desa. Namun Badan permusyawaratan Desa (BPD) desa kenantan belum melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Berdasarkan penjelasan dari Badan permusyawaratan Desa (BPD) (hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riadi selaku Ketua BPD) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan mengadakan rapat tahunan dengan kepala desa dalam membahas program Pemerintah Desa dalam setahun<sup>43</sup>. Dalam hal ini Badan permusyawaratan Desa (BPD) hanya mengetahui kinerja pemerintahan desa dan kepala desa dari laporan yang di berikan oleh kepala desa tanpa melihat langsung kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan, apakah sudah terlaksana atau belum terlaksananya peraturan desa dan peraturan kepala desa tersebut. Dalam penjelasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) di atas, merupakan laporan pertanggung jawaban kepala desa. Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati. Pertanggung jawaban di sampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa

---

<sup>43</sup> Slamer Riadi, *hasil wawancara*, BPD Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 16 oktober 2012)

(BPD) sekali dalam setahun dan apabila laporannya di tolak oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) harus di sempurnakan atau di lengkapi dan apabila telah dilengkapi dan di sempurnakan tersebut di tolak untuk kedua kalinya, Badan permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati<sup>44</sup>. Yang seharusnya dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan desa adalah dengan:

- a. Mengawasi apakah dalam peraturan desa dan peraturan kepala desa tersebut benar-benar sudah berjalan atau tidak.
- b. Mengawasi apakah terjadi penyelewengan dalam menjalankan perturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Menindak lanjuti apabila terjadi penyelewengan dalam menjalankan peraturan desa dan peraturan kepala desa tersebut.

Pelaksanaan pengawasan juga di atur di dalam dalam pasal 15 Peraturan Desa No 1 tahun 2010 Tentang Pungutan Fie Pengumpul TBS Pekarangan dan TBS Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Desa Kenantan bahwa:

---

<sup>44</sup> Haw, Widjaja, *Otonimi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2003, h. 28

- a. Menerima, mencari dan meliput keterangan atau laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa agar keterangan tersebut menjadi jelas dan lengkap.
- b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi dan badan, laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa.
- c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pungutan desa.
- d. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka atas tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa.
- e. Melakukan tindakan lain yang di anggap perlu untuk kelancaran proses pemeriksaan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa.

**Tabel. IV.3**

**Pelaksanaan Pengawasan BPD Terhadap PERDES dan Peraturan Kepala Desa**

No	Jawaban	Jawaban Responden	Persentase
1	a. sudah berjalan	2	22,22%
2	b. kurang berjalan	7	77.78%
3	c. tidak berjalan		
Jumlah		9	100%

*Sumber Data: Olahan Data Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa 77,78% pengawasan yang dilakukan oleh BPD kurang berjalan. Dan 22,22% sudah berjalan. Ini bisa dilihat bahwa pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa belum berjalan dengan baik. Karena pengawasan yang dilakukan dengan menerima laporan Kepala Desa tanpa melihat langsung atau meninjau langsung ke lapangan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ini tidak sesuai dengan peraturan desa yang sudah ada, dalam pasal 14 dan 15 peraturan desa kenantan nomor 1 tahun 2010 Tentang Pungutan Fie Pengumpulan TBS Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Desa Kenantan yang mengatur tentang bagaimana tata cara pengawasan yang harus dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) apabila telah terjadi kegagalan dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut.

Oleh karena itu dapatlah di tarik kesimpulan bahwa wewenang yang ke dua dalam PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa belum berjalan dengan baik oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan.

### **3. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.**

#### **a. Pengangkatan Kepala Desa**

Pelaksanaan wewenang Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang ketiga adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Kenantan di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam pasal 2 diatur bahwa Badan permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatannya kepada kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Jadi dalam hal ini ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan yaitu Slamet Riadi memberitahukan kepada Bpk Ruslan (kepala desa yang lama) bahwa masa jabatannya akan berakhir 6 (enam) bulan lagi

secara tertulis.<sup>45</sup> Oleh karena itu pengangkatan kepala desa kenantan yang sekarang (Bpk. Heri Suprihanta) karena berakhirnya masa jabatan kepala desa yang lama (Bpk. Ruslan) dan di adakan pemilihan Kepala Desa lagi sesuai dengan PERDA Kampar Nomor 4 Tahun 2007.

**b. Pemberhentian Kepala Desa**

Sedangkan pemberhentian kepala desa sendiri di atur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kampar Nomor 4 Tahun 2007 yang berisi kepala desa di berhentikan karena:

- (1) Kepala desa di berhentikan karena;
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri
  - c. Di berhentikan
- (2) Kepala desa di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c karena;
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
  - b. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama (6) bulan.

---

<sup>45</sup> Slamer Riadi, *hasil wawancara*, BPD Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 16 oktober 2012)



- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
- d. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan/atau
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa.

Jadi dalam hal ini ketua BPD Bpk. Slamet Riadi menjelaskan bahwa dalam hal pemberhentian Kepala Desa di desa kenantan ini di karenakan sudah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut dan diadakan pemilihan Kepala Desa baru untuk priode kedepannya.<sup>46</sup> Ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 huruf (c) dan ayat 2 huruf (a).

**Tabel.IV.4**

**Upaya Yang Di Lakukan Apabila Kepala Desa Melakukan Pelanggaran.**

No	Jawaban	Jawaban Responden	Persentase
1	a. di berhentikan dengan mengikuti peraturan yang sesuai dengan Perundang-Undang yang berlaku		
2	b.di tegur agar tidak mengulanginya lagi.	9	100%
3	c. di biarkan saja		
Jumlah		9	100%

*Sumber Data: Olahan Data Tahun 2012*

---

<sup>46</sup> Slamer Riadi, *hasil wawancara*, BPD Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 16 oktober 2012)

Dari keterangan tabel diatas dalam hal apabila Kepala Desa melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar dari pelanggaran tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan teguran kepada Kepala Desa agar tidak mengulangnya lagi.

Oleh karena itu dapatlah di tarik kesimpulan berdasarkan keterangan dari ketua BPD Bpk. Slamet Riadi bahwa wewenang yang ke tiga ini tidak terlaksana karena kepala desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di karenakan sudah berakhirnya masa jabatannya kepala desa tersebut.

#### **4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan system yang paling baik di dalam system politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan reformasinya politik di berbagai Negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya<sup>47</sup>. Menurut pendapat JJ.Rousseau rakyat dalam demokrasi bukanlah penjumlahan dari pada individu-individu dan yang mempunyai kehendak-kehendak, yang mana diperoleh dari individu tersebut melalui perjanjian-perjanjian masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Demokrasi di Desa Kenantan maka di seleggaraan pemilihan kepala desa secara langsung melalui

---

<sup>47</sup> Ni'matul huda, *hukum tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005) h. 237

panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sesuai dengan pasal 3 PERDA Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan dari Badan permusyawaratan Desa (BPD) (hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riadi selaku Ketua BPD) bahwa Di desa kenantan telah di bentuk panitian pemilihan kepala desa untuk masa jabatan 2008 sampai dengan 2014 sesuai dengan SK yang sudah dikeluarkan oleh BPD<sup>48</sup>. Pemilihan kepala desa kenantan di diselenggarakan pada bulan agustus tahun 2007, berdasarkan SK Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan No.01/BPD/TP/KN/VIII/2007. Adapun panitia yang dibentuk oleh BPD desa kenantan terdiri dari panitia pemilihan kepala desa dan panitia pemungutan suara. Panitia ini yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PERDA Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2007 yaitu: BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa yang keanggotaannya terdiri dari:

- a. Unsur perangkat desa
- b. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa
- c. Tokoh masyarakat

---

<sup>48</sup> Slamer Riadi, *hasil wawancara*, BPD Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 16 oktober 2012)

Adapun jumlah panitia yang di bentuk oleh BPD desa kenantan yaitu sebanyak 11 orang. Adapun panitia yang dibentuk oleh BPD desa kenantan dalam pemilihan kepala desa kenantan sebagai berikut:

Tabel.IV.5

<b>No</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JABATAN DALAM PMERINTAHAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>KET.</b>
1	SOGIMAN	SEKRETARIS DESA	KETUA	
2	ABDUL HANIF	KAUR UMUM	SEKERTARIS	
3	WAKHIDIN	KAUR PEMRINTAHAN	ANGGOTA	
4	SUWARUDI	KAUR PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
5	ABROR	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	
6	KAREBET	LPM	ANGGOTA	
7	WAHIDIN	KADUS I	ANGGOTA	
8	NUR YAKIN	KADUS II	ANGGOTA	
9	SUKIMIN	KADUS III	ANGGOTA	
10	BUDI ISMAIL	LPM	ANGGOTA	
11	MUHLIDIN	LPM	ANGGOTA	

*Sumber Data:kantor desa kenantan tahun 2007*

Selain juga di bentuk panitia pemilihan kepala desa, BPD juga membentuk panitia pemungutan suara pemilihan kepala desa kenantan tahun 2007. Berikut adalah tabel panitia pemungutan suara pemilihan kepala desa kenntan.

**Tabel. Iv.6****Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kenantan**

<b>No</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JABATAN DALAM PMERINTAHAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>KET.</b>
1	SOGIMAN	SEKRETARIS DESA	KETUA	
2	ABDUL HANIF	KAUR UMUM	SEKERTARIS	
3	SUWARUDI	KAUR PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
4	WAKHIDIN	KAUR PEMRINTAHAN	ANGGOTA	
5	WAHIDIN	KADUS I	ANGGOTA	
6	NUR YAKIN	KADUS II	ANGGOTA	
7	SUKIMIN	KADUS III	ANGGOTA	
8	KAREBET	LPM	ANGGOTA	

*Sumber Data:kantor desa kenantan tahun 2007*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah panitia kepala desa kenantan sebanyak 11 orang, termasuk juga panitia pemungutan suara yang terdapat dalam panitia pemilihan kepala desa sebanyak 8 orang.

Namun dari data yang di dapat oleh penulis dari ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) tidak terdapat panitia pelaksana di setiap TPS yang berada di setiap dusun. Sehingga terpilihlah Bpk.Heri Suprihanta sebagai kepala desa kenantan untuk priode 2008-2014.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 dan diatur lebih jelas di dalam PERDA kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan Negara yang baik dengan berdasarkan pada peraturan yang baik.

Sehingga wewenang yang ketiga yaitu pembentukan panitia pemilihan kepala desa sudah terlaksana. Hal ini sesuai dengan konsep Negara hukum dan demokrasi yaitu dalam penjelasan Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) ini mengandung arti negara melaksanakan fungsinya tidak berdasarkan kekuasaan tetapi haruslah berdasarkan hukum yang berlaku dan menegakkan keadilan.

#### **5. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Wewenang Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya sebagaimana yang di atur dalam PERDA Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah wewenang untuk menggali, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi wewenang ini merupakan jembatan penghubung antara rakyat dengan

pemerintahan desa. Segala sesuatu yang berasal dari rakyat hendaknya di sampaikan kepada pemerintahan desa melalui jalur ini, agar pemerintah desa mengetahui seperti apa aspirasi masyarakat yang berkembang di masyarakat, agar kemudian pemerintah desa dapat bertindak sesuai dengan kehendak rakyat tersebut. Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan masyarakat dalam hal ini bukan hanya sekedar untuk menyampaikan pesan, akan tetapi juga dapat memaksa pesan tersebut dengan kekuatan hukum, dalam hal ini di maksudkan bahwa jika sesuatu aspirasi rakyat di muat dalam suatu peraturan desa sebagai unsur eksekutif wajib melaksanakannya dan dilaksanakan dalam pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat desa adalah sebagai tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Dalam menjalankan wewenangnya ini Badan permusyawaratan Desa (BPD) desa kenantan dalam menggali, menampung, menghimpun, laporan ataupun aspirasi dari masyarakat kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pasal 24 PERDA Nomor 9 Tahun 2007 di jelaskan:

- (1). Setiap aspirasi masyarakat yang di terima oleh anggota BPD harus terlebih dahulu di tampung dan di saring untuk di bahas dalam rapat BPD.

- (2). Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagai di maksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BPD untuk menindak lanjuti sesuai aspirasi yang di terima.
- (3). Aspirasi masyarakat yang di tindak lanjuti merupakan aspirasi yang bersifat membangun dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4). Setiap aspirasi yang diterima oleh BPD harus di catat dan di bukukan oleh sekretaris BPD.

**Tabel. IV.7**  
**Pembukuan Yang Dilakukan Oleh BPD Tentang Aspirasi Masyarakat Yang di Terima Oleh BPD.**

no	Jawaban	Jawaban Responden	Persentase
1	a. ada	3	33,33%
2	b. tidak ada	6	66,67%
3	c. tidak tahu		
	Jumlah	9	100%

*Sumber Data: Olahan Data Tahun 2012*

Dalam kusioner yang penulis berikan kepada anggota BPD, ternyata hanya beberapa anggota saja yang mencatat dan membuat pembukuan terhadap aspirasi yang di sampaikan masyarakat kepada BPD dalam hal ini menjadikan suatu konsekuensi terhadap tersalurnya aspirasi yang seharusnya dapat di tindak lanjuti dengan cepat, hal ini bisa saja terjadi kelupaaan oleh



setiap anggota dalam menerima aspirasi karena tidak dilakukan pencatatan terhadap aspirasi masyarakat tersebut.

Ada beberapa cara yang seharusnya dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dapat di tindak lanjuti yaitu dengan cara lisan maupun tulisan. Dari keterangan anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD), proses penyampain aspirasi masyarakat disampaikan langsung oleh masyarakat kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan cara langsung menyampaikannya secara lisan.

Namun dalam pelaksanaannya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sangat sulit untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan alasan masyarakat tidak menyampaikannya secara tertulis, Badan permusyawaratan Desa (BPD) desa kenantan hanya mau menerima aspirasi masyarakat dengan cara tertulis. Tapi dalam hal ini Badan permusyawaratan Desa (BPD) tidak membuat kotak kritik dan saran bagi masyarakat. penjelasan dari Badan permusyawaratan Desa (BPD) (wawancara dengan Bpk Slamet Riadi selaku ketua BPD) bahwa dalam menyampaikan aspirasinya msyarakat lebih bnyak menyampaikannya secara lisan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Slamer Riadi, *hasil wawancara*, BPD Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 16 oktober 2012)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa BPD dalam melaksanakannya wewenang yang ke lima dalam hal menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa atau instansi yang berwenang belum berjalan dengan baik.

#### **6. Menyusun Tata Tertib BPD .**

Tata tertib bagi BPD ini sangat penting mengingat Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga demokrasi yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku baik dalam Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 dan diperkuat dengan Perda Kampar Nomor 09 Tahun 2007. oleh karena itu kinerja dari Badan permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting bagi masyarakat.

Dalam Pasal 25 Perda No 09 Tahun 2007 disebutkan bahwa Rapat BPD di lakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD). Rapat di pimpin oleh ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD).

Tata tertib Badan permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam

melaksanakan wewenangnya dan juga kewajibannya sebagai masyarakat. Badan permusyawaratan Desa (BPD) desa kenantan sendiri telah menyusun tata tertib Badan permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri berdasarkan kusioner yang diberikan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) desa kenantan sebagai berikut:

Tabel.IV.8

Penyusunan dan pembuatan tata tertib BPD.

NO	Jawaban	Jawaban Responden	Persentase
1	a. ada	9	100%
2	b. tidak ada		
3	c.tidak tahu		
4	Jumlah	9	100%

*Sumber Data: Olahan Data Tahun 2012*

Berdasarkan hasil kusioner di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan Tata Tertib Badan permusyawaratan Desa (BPD) telah di lakukan dan di buat oleh semua anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD). Bahwa tata tertib yang di buat oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) hanya berupa kesadaran anggota seperti menghadiri setiap kali ada rapat, datang tepat waktu, mengenakan seragam yang sopan. Yang pada pokoknya hanya mengatur tentang tata cara rapat anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD),<sup>50</sup> namun di dalamnya tidak di buat aturan bagaimana sikap dan prilaku

---

<sup>50</sup> Slamer Riadi, *hasil wawancara*, BPD Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 16 oktober 2012)

mereka sebagai wakil masyarakat desa kenantan untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa dalam penyusunan tata tertib Badan permusyawaratan Desa (BPD) masih belum memahami bagaimana cara penyusunan tata tertib itu sendiri.

Jadi dapat diambil kesimpulan dalam wewenang Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang ke enam adalah menyusun tata tertib Badan permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan dengan baik di karenakan isi dari tata tertib tersebut hanya berupa tata tertib dalam mengikuti rapat saja dan tidak di bahas mengenai larangan-larangan yang berlaku bagi setiap anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari masyarakat.

#### **B. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh BPD Dalam Melaksanakan Wewenangnya.**

Peraturan Desa dapat dijadikan sebagai kerangka berpijak bagi pemerintah desa dan menjadi jalur untuk menjalankan roda pemerintahan, Peraturan Desa juga dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi desa jika digunakan untuk mengatur potensi-potensi kekayaan alam yang dimiliki suatu desa sehingga nantiya akan meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes), selain itu Peraturan Desa juga dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan dan mencegah permasalahan yang ada di desa. peraturan Desa mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu desa. Dari

penjelasan di atas, bahwa beberapa wewenang Badan permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kenantan sudah terlaksana tetapi belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa kewenangan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Di desa Kenantan yang belum dapat terlaksana dengan baik.

Hal ini pastinya mempunyai sebab-sebab ataupun kendala-kendala yang di alami oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan wewenangnya sehing belum berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPD mengalami kesulitan-kesulitan yang menjadikan setiap anggota BPD sulit untuk menjalankan wewenangnya sebagai anggota BPD baik secara kelompok maupun individu belum berjalan dengan baik. Menurut penulis, dari analisis hasil penelitian yang dilakukan di desa Kenantan, faktor-faktor yang menjadikan kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan wewenang BPD.**

Pentingnya dalam menjalankan dan pelaksanaan wewenang Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka menjalankan pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintahan desa, untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kebijakan-kebijakan kepala desa dalam mengambil keputusan apakah merugikan kepentingan umum atau masyarakat dan menguntungkan masyarakat.

Wewenang Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan tanggung jawab yang sangat besar mengingat setiap anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil masyarakat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel.IV.9

Pemahaman BPD terhadap pelaksanaan wewenang BPD.

NO	JAWABAN	jawaban responden	persentase
1	a.tahu	3	33,33%
2	b. kurang tahu	6	66,68%
3	c.tidak tahu		
Jumlah		9	100%

*Sumber Data: Olahan Data Tahun 2012*

Dari tabel tersebut dapat dilihat, bahwa sebagian besar anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) desa kenantan kurang memahami terhadap pelaksanaan wewenangnya sebagai anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD). Yang pada kenyataannya ada beberapa wewenangnya yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## 2. Faktor Usia

Dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) haruslah memiliki kondisi fisik yang bagus. Dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Kurangnya ataupun tidak berjalannya kinerja anggota Badan permusyawaratan Desa

(BPD) dalam melaksanakan dan menjalankan wewenangnya karena factor usia yang sudah terlalu tua yang membuat mereka sulit untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Ada juga yang memiliki penyakit yang lama tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan ada juga yang sudah mengundurkan diri dari keanggotannya sebagai Badan permusyawaratan Desa (BPD) karena sudah tidak bisa menjalankan tugasnya, namun tidak ada penggantinya untuk mengisi kekosongannya di dalam struktur anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD). Tapi namanya tetap ada di dalam struktur Badan permusyawaratan Desa (BPD) desa kenantan dan pemerintah desa tetap memberikan tunjangan meskipun sudah tidak lagi menjadi anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dari penjelasan dengan kepala desa kenantan (Bpk. Heri Suprihanta) menjelaskan bahwa uang tunjangan untuk Badan permusyawaratan Desa (BPD) tetap diberikan utuh sesuai dengan jumlah anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 9 orang anggota walaupun satu orang anggota sudah dinyatakan mundur<sup>51</sup>.

### **3. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur pemerintahan desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD) harus di tunjang atau di dukung dengan

---

<sup>51</sup> Heri Suprihanta, *hasil wawancara, Kepala Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan)* , 15 oktober 2012

sarana dan prasarana yang memadai agar Badan permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti ruang pertemuan atau balai pertemuan untuk mengadakan rapat dengan masyarakat, ruang kerja dan fasilitas pendukung lainnya seperti meja dan kursi-kursi.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di desa kenantan, bahwa Badan permusyawaratan Desa (BPD) belum mempunyai gedung ataupun kantor sendiri. Yang selama ini ruang kerja anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) bertempat di kantor desa. Dengan sarana dan prasarana yang tidak mendukung bagi anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) desa kenantan yang berjumlah 9 orang untuk bisa bekerja dengan maksimal. Selama ini pertemuan atau rapat yang di adakan oleh anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan di rumah ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri. Ini merupakan kendala bagi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat yang duduk di pemerintahan desa kenantan.

#### **4. Kurangnya Kesadaran Hukum Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD)**

Memiliki jabatan di dalam Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan jabatan publik yang dapat menumbuhkan rasa bangga bagi sebagian besar rakyat desa jika mampu mendudukinya, Perebutan kursi



anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan arena politik terendah selain pemilihan Kepala Desa, oleh karenanya banyak orang yang mengincar kursi keanggotaan Badan permusyawaratan Desa (BPD), selain mengambil keuntungan sebagai sarana untuk menaikkan pamor keuntungan yang juga merupakan alasan utama keanggotaan BPD diperebut adalah penghasilan dan tunjangan keanggotaannya yang boleh dikatakan lumayan. Meskipun pekerjaan sebagian anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) banyak diinginkan oleh masyarakat desa namun ternyata pekerjaan sebagai Badan permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah aktivitas yang utama dalam dalam kehidupan sehari-hari para anggotanya, pekerjaan sebagai anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) hanyalah pekerjaan sampingan bagi sebagian besar anggotanya, tidak ada anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang benar-benar meluangkan waktu dan pikirannya untuk Badan permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri.

Dari hasil kusioner yang dibeikan kepada responden bahwa pekerjaan selain anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah petani yang dijadikan sebagai pekerjaan pokok sehari-hari, sehingga mereka menjadikan pekerjaan itu sebagai pekerjaan utama untuk menjadi tumpuan hidup mereka di bandingkan aktifitas lainnya. Berikut merupakan tabel tentang pekerjaan pokok selain menjadi anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel.IV.10

Profesi anggota BPD selain keanggotaannya sebagai BPD.

no	pekerjaan selain anggota BPD	jawaban responden	persentase
1	a. PNS		
2	b. Wraswasta		
3	c. Petani	9	100%
4	d. Ibu Rumah Tangga		
5	e. lain-lain		
jumlah		9	100%

*Sumber Data: Olahan Data Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, seluruh anggota BPD berlatar belakang sebagai petani. Setiap harinya di habiskan untuk berladang ataupun berkebun yang menggunakan kekuatan fisik yang bisa menguras tenaga yang tingkat kelelahannya di bandingkan dengan pekerjaan lainnya. Dengan demikian untuk menjalankan tugasnya sebagai keanggotaannya sebagai anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) akan tidak fokus lagi untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini juga dipengaruhi oleh keadaan perekonomian Indonesia saat ini, contohnya saja naiknya harga barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari.begitu juga sebaliknya dengan turunnya harga jual hasil pertanian dan perkebunan sekarang ini.

Ini membuktikan bahwa penghasilan dari pertanian lebih menjanjikan dari pada hanya berpatokan pada keanggotannya sebagai Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) baru dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik sebagai anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) jika tunjangan yang di dapatkan oleh setiap anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) sudah bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jadi, dengan situasi tersebut menjadikan kendala bagi anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan untuk bisa melaksanakan wewenangnya.

##### **5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Untuk Membantu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

pembangunan desa bukanlah tugas pemerintahan desa saja sebagai pelaksana roda pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat di desa yang dilandaskan dengan demokrasi. namun juga menjadi tugas seluruh komponen yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di desa tersebut. pemerintahan desa sebagai unsur pelaksana roda pemerintahan desa membutuhkan partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan desa tersebut ditujukan untuk masyarakat desa secara keseluruhan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan adalah partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik ini merupakan upaya untuk melakukan pembatasan kekuasaan, untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggara pemerintahan desa.

Dengan adanya partisipasi dalam kegiatan politik maka pemerintahan desa harus mempertimbangkan kepentingan rakyat desa sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Untuk mewujudkan good governance maka dipandang perlu diatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara Negara (pemerintahan) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Negara .

masyarakat tidak banyak peduli terhadap proses pemerintahan desa dan cenderung tidak ambil pusing terhadap urusan-urusan di dalam pemerintahan desa. Bahkan banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan hak mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat di dalam Pemerintahan Desa.<sup>52</sup> Maka dengan situasi yang terjadi seperti ini menjadikan Badan permusyawaratan Desa (BPD) sulit dalam

---

<sup>52</sup> Slamer Riadi, *hasil wawancara*, BPD Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Desa Kenantan , 16 oktober 2012)

menjalankan fungsinya sebagai unsur pemerintahan desa sebagai wakil masyarakat desa kenantan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian sebagai berikut:

#### **A. KESIMPULAN.**

1. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan diatur dalam peraturan daerah PERDA kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik. Agar terciptanya suatu pemerintahan yang jujur dan bersih tidak adanya penyelewengan kekuasaan oleh sebagian orang yang duduk di pemerintahan. Dalam pelaksanaannya BPD kurang memahami mengenai pelaksanaan wewenangnya sebagai pengawas terhadap pemerintahan desa kenantan. Seperti yang terjadi di lapangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa kenantan belum bisa menjalankan wewenangnya dengan baik.

2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan wewenangnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kenantan banyak mendapatkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan wewenangnya. kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan wewenangnya yang membuat pelaksanaan wewenangnya belum bisa berjalan dengan baik. Dan juga ditambah lagi dengan faktor-faktor lainnya. Dengan demikian pelaksanaan wewenangnya sebagai pengawas pemerintahan desa tidak bisa berjalan dengan maksimal.

## **B. SARAN**

1. Terhadap pelaksanaannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus lebih memahami dan teliti dalam menjalankan dan melakukan suatu tindakan-tindakan terhadap pelaksanaan wewenangnya. Agar terlaksananya tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan wewenangnya.
2. Meningkatkan kesadaran BPD terhadap tanggung jawab yang besar sebagai perwakilan dari masyarakat desa dalam pemerintahan desa agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyelesaikan semua masalah atau kendala-kendala yang di hadapi

BPD dalam melaksanakan wewenangnya sebagai tugas dan fungsinya  
sebagai wakil rakyat



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdul Rozaki, dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Ires Pres, Yogyakarta : 2005,
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2005
- Maryuni, *Alokasi Dana Desaformulasi dan Implementasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2002
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005
- R.Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press, 1989
- Soewarno Handajaningrat dan R.Hindratmo, *Landasan dan Pedomen Kerja Administrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa*, CV. Haji Masagung, Jakarta:1993
- Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonoi Daerah*, Lopera Pustaka Utama, Jokyakarta:2001
- Sunaryo, Siswanto, Drs.H, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinat Grafika, Jakarta: 2006
- Wasistiono,Sadu,Prof, Dr, Tahir ,Irwan *Prospek Perkembangan Desa*, CV Fokus Media, bandung: 2007
- Widjaja H.A.W, Prof.Drs, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2003,
- \_\_\_\_\_, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo persada Jakarta: 2007
- \_\_\_\_\_, *Otonimi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta:PT. raja Grafindo, 2003

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah Beserta Penjelasannya*: Pustaka Widyatama

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (1) Setelah di Amandemen Tahun 2000.

Undang-Undang No 22 Otonomi Daerah 1999, Sinar Grafika, 1999,.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman  
Umum Pengaturan Mengenai Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No, 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga  
Kemasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No, 09 Tahun 2007 Tentang Badan  
Permasyarakatan Desa.